

**TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH  
DALAM IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2013**

Sigit Eka Saputra<sup>1</sup>, Liky Faizal<sup>2</sup>, Alan Yati<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
E-mail : [sigitevan99@gmail.com](mailto:sigitevan99@gmail.com)<sup>1</sup>, [likyfaizal@gmail.com](mailto:likyfaizal@gmail.com)<sup>2</sup>, [alanyati@radenintan.ac.id](mailto:alanyati@radenintan.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstrak**

Permasalahan HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, termasuk di lingkungan RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Program penanggulangan yang seharusnya dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan berbagai unsur masyarakat pada praktiknya belum menjangkau seluruh elemen secara merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013, khususnya Pasal 5 tentang pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Lokasi penelitian berada di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan masyarakat RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Populasi penelitian berjumlah 117 orang, dengan 11 orang dipilih sebagai sampel menggunakan teknik purposive sampling yang terdiri dari 4 staf Dinas Kesehatan dan 7 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, a) pemerintah telah melaksanakan beberapa program, seperti komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelayanan tes HIV di fasilitas kesehatan, serta surveilans pada kelompok berisiko. Namun, pelaksanaannya belum menjangkau sektor dunia usaha dan organisasi masyarakat secara merata. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat dan masih kuatnya stigma terhadap HIV/AIDS menyebabkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan masih terbatas. b) Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 pada dasarnya telah sejalan dengan konsep *siyasaḥ syar'iyah* yang berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), namun pelaksanaannya belum optimal terutama dalam pemerataan edukasi dan koordinasi lintas sektor.

**Kata Kunci:** HIV/AIDS, Implementasi Kebijakan, Pencegahan HIV, *Siyasaḥ Tanfidziyah*

**Abstract**

*The issue of HIV/AIDS remains a public health challenge in Lampung Province, including in RT 13 LK I Sukabumi Sub-district, Bandar Lampung City. Prevention and control programs that should be implemented in an integrated manner and involve various community elements have not yet reached all sectors of society evenly. This condition indicates a gap between policy norms and their actual implementation in the field. This study aims to analyze the implementation of the HIV/AIDS prevention and control policy based on the Lampung Provincial Regulation Number 1 of 2013, particularly Article 5 concerning the implementation of prevention and control programs. This study employs a qualitative approach with a descriptive method. The research was conducted at the Lampung Provincial Health Office and among the community of RT 13 LK I Sukabumi Sub-*

district, Bandar Lampung City. The population consisted of 117 people, with 11 participants selected as samples using purposive sampling, including 4 staff members from the Provincial Health Office and 7 community members. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using qualitative analysis. The results show that the government has implemented several programs, such as communication, information, and education (KIE), HIV testing services in health facilities, and surveillance among high-risk groups. However, these programs have not yet reached the business sector and community organizations evenly. In addition, low public understanding and persistent stigma toward HIV/AIDS have limited community participation in prevention programs. The implementation of Article 5 of Lampung Provincial Regulation Number 1 of 2013 is generally in line with the concept of *siyasa syar'iyah*, which emphasizes the protection of life (*hifz al-nafs*). Nevertheless, its implementation has not been fully optimal, particularly in terms of equitable public education and cross-sectoral coordination.

**Keywords:** HIV/AIDS, Policy Implementation, HIV Prevention, *Siyasa Tanfidziyah*

## A. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

HIV/AIDS terus menjadi masalah kesehatan masyarakat di dunia. Epidemio penyakit HIV/AIDS memiliki tantangan tersendiri, dimana penyakit menular lainnya cenderung menurun namun berbeda dengan HIV/AIDS yang mengalami peningkatan. Fenomena tersebut cukup meresahkan dimana penularan HIV/AIDS cenderung terus meningkat ketika berbagai upaya pencegahan dan pengendalian telah dilakukan.

Kesehatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa. Tanpa kualitas kesehatan yang baik, keberlangsungan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya akan terhambat. Persoalan kesehatan masyarakat tidak hanya terkait penyakit menular yang bersifat klasik seperti tuberkulosis, malaria, atau demam berdarah, namun juga penyakit menular modern yang lebih kompleks seperti HIV/AIDS. Penyakit ini berbeda dengan penyakit menular lainnya, karena selain menyerang daya tahan tubuh manusia, HIV/AIDS juga menimbulkan stigma sosial, diskriminasi, dan dampak multidimensional yang menghambat upaya penanggulangan.<sup>1</sup>

Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, Jumlah HIV dan AIDS di Provinsi Lampung sepanjang tahun 2024 yaitu sebanyak 188 orang, dan Kota/kabupaten yang paling banyak terkena yaitu di Kota Bandar Lampung yaitu sebanyak 89 orang.<sup>2</sup> Diperkirakan jumlah HIV di Provinsi Lampung

<sup>1</sup> Suyono, Kesehatan Masyarakat Indonesia (Rineka Cipta, 2010).

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, 'Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Penyakit Di Provinsi Lampung, 2024 - Tabel Statistik', 2024 <<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTA1Q1ptRmhUMEpXWTBsQmQyZzBjVzgwUzB4aVp6MDkjMw==/kasus-penyakit-menurut->

hingga sekarang yaitu sebanyak 10.000 yang terkena HIV.<sup>3</sup> Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagai ibu kota provinsi sekaligus pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan, Kota Bandar Lampung memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap penyebaran HIV/AIDS dibandingkan daerah lain di Lampung.

Permasalahan HIV/AIDS masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Provinsi Lampung, termasuk di lingkungan RT 13 LK I Kelurahan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. Meskipun Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, implementasi kebijakan tersebut, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 mengenai pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan, belum sepenuhnya berjalan optimal di tingkat kelurahan. Program yang seharusnya dilaksanakan secara terpadu dan melibatkan berbagai unsur, termasuk sektor dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan, pada praktiknya belum menjangkau seluruh elemen masyarakat secara merata. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kebijakan dan realitas pelaksanaannya di lapangan.

Persepsi masyarakat terhadap HIV/AIDS masih dipengaruhi oleh stigma, stereotip negatif, serta rendahnya tingkat pemahaman mengenai cara penularan dan pencegahannya. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam program pencegahan cenderung terbatas dan belum menunjukkan keterlibatan aktif yang berkelanjutan. Hambatan tersebut diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas sektor dan belum optimalnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam mengintegrasikan berbagai upaya penanggulangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif, antara lain melalui peningkatan penyuluhan berbasis komunitas, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai agen perubahan sosial, serta pengaktifan kembali peran KPA secara fungsional dan terstruktur, guna mendukung efektivitas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Lampung secara berkelanjutan.

*Fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>4</sup> Tinjauan *siyasah tanfidziah* menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari bentuk eksekusi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman penyakit menular berbahaya. Konsep *siyasah tanfidziah* menekankan pada fungsi eksekutif pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan keputusan politik yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam konteks pencegahan HIV/AIDS, pemerintah sebagai *ulil amri* berwenang melaksanakan kebijakan kesehatan masyarakat untuk menjaga

---

[kabupaten-kota-dan-jenis-penyakit-di-provinsi-lampung--2024.html?year=2024>](#) [accessed 19 September 2025].

<sup>3</sup> Otta Nur Kirana, 'Pandangan Terhadap HIV' (Wawancara Pribadi, 7 Januari 2026).

<sup>4</sup> Kartika S, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), pp. 60–73, doi:10.24042/as-siyasi.v1i2.11006.

ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan umum sesuai prinsip *siyasaḥ tanfidziyah*. Sebagaimana dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan pencegahan HIV/AIDS juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْنُونٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“*Kalian semua adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya*”  
(HR. Al Bukhori dan Muslim).

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 merupakan bentuk kebijakan daerah yang menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian HIV/AIDS dan IMS. Lahirnya peraturan ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Lampung yang menunjukkan tren signifikan dari tahun ke tahun. Ketentuan dalam Perda ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS. Hal ini mencerminkan adanya pendekatan partisipatif dalam kebijakan publik, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung perilaku hidup sehat. Melalui peran serta masyarakat, diharapkan terbentuk kesadaran bahwa HIV/AIDS dan IMS bukan semata-mata persoalan individu, melainkan masalah sosial yang berdampak terhadap ketahanan keluarga, produktivitas sosial, dan pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan (*regulator*), tetapi juga sebagai pelaksana pelayanan publik (*service provider*) dan pemberdaya masyarakat (*empowerment*). Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tidak cukup hanya berhenti pada tataran normatif, melainkan harus diwujudkan melalui tindakan nyata berupa penyediaan layanan kesehatan, sosialisasi yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat dan berbagai sektor terkait. Fungsi pemerintah meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, dan pemberdayaan. Dalam konteks pencegahan HIV/AIDS, fungsi pengaturan tercermin dalam pembentukan Perda, fungsi pelayanan diwujudkan melalui program kesehatan seperti penyuluhan dan pengobatan, sedangkan fungsi pemberdayaan terlihat dari upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyakit tersebut. Peran pemerintah tidak hanya sebatas menjalankan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut memberikan

kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Pasal 5 Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 sangat bergantung pada optimalisasi peran pemerintah sebagai regulator, pelayan, dan pemberdaya dalam mewujudkan tujuan perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Sejauh ini penelitian yang membahas isu tentang peran pemerintah dalam pencegahan HIV dan AIDS, mulai dari penelitian pertama oleh Deni Iswanto yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan.<sup>5</sup> Hasil penelitian mengungkapkan tantangan dan strategi dalam pelaksanaan kebijakan, termasuk upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan, serta mengurangi stigma terhadap individu yang hidup dengan HIV/AIDS. Penelitian oleh Ananda Horizki Pratama, Hary Priyanto, dan Niko Pahlevi Hentika yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Gay di Kabupaten Banyuwangi.<sup>6</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan bersama KPA dan pemangku kepentingan lainnya telah berupaya mengendalikan HIV/AIDS di Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana tertulis dalam kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017. Namun, pada akhirnya tidak semua komunitas tertentu mengetahui keberadaan peraturan yang dibuat pemerintah dan sosialisasi serta kesadaran di komunitas tertentu masih terbatas, sehingga keberadaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 hanya terbatas pada peraturan tertulis. Penelitian oleh Ni'mah Mubarakah yang berjudul Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Cirebon.<sup>7</sup> Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penanggulangan HIV/AIDS membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait lainnya, serta perluasan anggaran untuk meningkatkan akses dan layanan kesehatan bagi ODHA. Penelitian oleh Firrie Ninditha Putri, Asep Sumaryana, dan Dedi Sukarno yang berjudul Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bogor.<sup>8</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS di Kota Bogor cukup baik, karena mampu mengurangi kasus positif setiap tahunnya. Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu ditangani dengan konsep 3 nol pada tahun 2030, dengan tujuan menghilangkan kasus baru, kasus kematian akibat HIV/AIDS, dan diskriminasi yang diterima oleh ODHA. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor

---

<sup>5</sup> I Denny, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kabupaten Lamongan', *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Lamongan*, 7 (2024).

<sup>6</sup> Ananda Horizki Pratama, Hary Priyanto, and Niko Pahlevi Hentika, 'Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Pada Gay Di Kabupaten Banyuwangi', *Katarsis*, 1.3 (2024), doi:10.62734/kts.v1i3.279.

<sup>7</sup> Okah Mubarakah and others, 'Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS Di Kabupaten Cirebon', *Jatiswara*, 40.1 (2025), doi:10.29303/jtsw.v40i1.1175.

<sup>8</sup> Firrie Ninditha Putri, Asep Sumaryana, and Dedi Sukarno, 'Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bogor', *Jurnal Administrasi Negara*, 14.1 (2022), pp. 16-31.

Nomor 4 Tahun 2016 oleh KPA masih belum optimal, poin utamanya adalah pihak terkait. Penelitian **Kelima** oleh Nur Wandira Kusmayadi, Diana Hertati yang berjudul Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS.<sup>9</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya seluruh indikator model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn sebagai pengukur keberhasilan dari implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Jiwan yang disebabkan karena tujuan kebijakan yang terlalu ideal, adanya sumber daya yang belum memadai, komunikasi kepada masyarakat yang belum menyeluruh, serta keadaan lingkungan ekonomi dan lingkungan sosial Kecamatan Jiwan yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan penanggulangan HIV/AIDS.

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas peran pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melalui implementasi kebijakan atau peraturan daerah serta menyoroti berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi, dan belum optimalnya koordinasi. Namun, penelitian penulis berbeda karena menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam *fiqh siyasah* sebagai pisau analisis, sehingga tidak hanya menilai efektivitas kebijakan, tetapi juga meninjau kesesuaian peran pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam dan nilai kemaslahatan.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah tanfidziyah* terhadap peran pemerintah dalam implementasi implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013?

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penulis pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dimana peneliti mengadakan penelitian secara langsung dilapangan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>10</sup> Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang secermat mungkin tentang sesuatu, individu, gejala, keadaan, atau kelompok tertentu.<sup>11</sup> Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat melalui data yang secara langsung diperoleh peneliti di lokasi penelitian yaitu pada masyarakat RT 13 lk I kelurahan

---

<sup>9</sup> Nur Wandira Kusmayadi and Diana Hertati, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2022), pp. 122-29  
<<https://jkp.ejournal.unri.ac.id><https://jkp.ejournal.unri.ac.id>>.

<sup>10</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2006.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2018).

sukabumi Kota Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder didapat melalui buku-buku, jurnal, dan dokumentasi.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.<sup>12</sup> Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu 117 orang.

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Peneliti dapat mengambil sebagian dari populasi sebagai sampel, yaitu antara 10–15% atau 20–25%.<sup>13</sup> Sampel dipilih menggunakan *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, jabatan, dan keterlibatan mereka terhadap kebijakan yang diteliti yaitu 11 orang sebagai sampel Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 4 (empat) orang staff, dan 7 (tujuh) orang masyarakat yang mengetahui HIV/AIDS. Karakteristik informan dalam penelitian ini bersifat heterogen, karena berasal dari berbagai unsur, yaitu pemerintah, dan masyarakat.

Metode pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk kepentingan dalam penelitian. Pada penelitian ini ada tiga tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi yang bertujuan untuk memudahkan mendapatkan hasil dari suatu penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, maksudnya adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang terkait, sehingga dapat dengan mudah dipahami untuk ditarik kesimpulannya.

## C. PEMBAHASAN

### 1.1 Peran Pemerintah Dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013

Peraturan daerah adalah sebuah produk legislasi yang dibuat atas inisiasi DPRD dan atau pemerintah daerah. Penyusunan sebuah peraturan daerah didasar kan atas dasar urgensi mendesak pada lingkungan daerah. Dasar dari pembuatan sebuah peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah.<sup>14</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk sebagai bentuk tindak lanjut dari kebijakan nasional di bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi meningkatnya kasus HIV/AIDS dan IMS. Perda ini menjadi dasar

<sup>12</sup> S Arikunto, 'Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Pp. 22--23)', PT. Rineka Cipta, 2013.

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta, 2006).

<sup>14</sup> Aden Rosadi and Nashrulloh Nashrulloh, 'Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah', *Al-Adalah*, 14.1 (2018), p. 47, doi:10.24042/adalah.v14i1.2135.

hukum bagi pemerintah daerah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam menyelenggarakan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Selain mengatur peran pemerintah daerah, perda ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya guna menciptakan lingkungan sosial yang mendukung upaya pencegahan, perlindungan hak penderita, serta penghapusan stigma dan diskriminasi.

Pasal 5 mengamanatkan bahwa upaya pencegahan HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) dilakukan melalui beberapa strategi utama, meliputi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual, tes dan konseling HIV, kewaspadaan umum di fasilitas pelayanan kesehatan, skrining darah dan jaringan tubuh, serta surveilans epidemiologi dan perilaku.<sup>15</sup>

Program KIE yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan telah dilaksanakan secara rutin melalui media massa, lembaga pendidikan, serta LSM dan organisasi kemasyarakatan.<sup>16</sup> Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat bahwa sering mendengar terkait HIV melalui media social ataupun berita berita elektronik, jarang sekali terlihat dilingkungan masyarakat dilakukan sosialisasi secara langsung.<sup>17</sup>

Pada aspek pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (sex education), Dinas Kesehatan Provinsi Lampung berperan sebagai pendukung melalui penyediaan materi edukasi, khususnya bagi remaja tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Secara kelembagaan, pendidikan kesehatan reproduksi merupakan tanggung jawab Kesehatan Keluarga (Kesga) dan BKKBN. Pelaksanaan tes HIV pada remaja sekolah masih dibatasi oleh ketentuan administratif berupa persetujuan orang tua, sedangkan pada mahasiswa persetujuan tersebut tidak diperlukan. Hal ini berdampak pada keterbatasan pelaksanaan deteksi dini HIV pada kelompok usia remaja sekolah.<sup>18</sup> Hal ini sejalan dengan pemuda RT 13 lk I Kelurahan Sukabumi Kota Bandar Lampung bahwa, informasi tentang kesehatan reproduksi dan HIV didapat dari sekolah melalui guru atau kegiatan penyuluhan yang diadakan bersama pihak puskesmas.<sup>19</sup>

Tes dan konseling HIV telah menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan. Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, maupun rumah sakit, diwajibkan mampu melaksanakan tes HIV. Selain itu, kewaspadaan umum di fasilitas pelayanan kesehatan telah diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya terhadap HIV/AIDS, tetapi juga terhadap seluruh penyakit menular dan tidak menular. Skrining darah, fraksi darah, dan jaringan tubuh yang

<sup>15</sup> Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pengendalian Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) Di Provinsi Lampung.

<sup>16</sup> Otta Nur Kiana, 'Program KIE' (Wawancara Pribadi, 2026).

<sup>17</sup> Satria, 'Program KIE' (Wawancara Pribadi, 8 Januari 2026).

<sup>18</sup> Otta Nur Kirana, 'Pendidikan Kesehatan Dan Sex Education' (Wawancara Pribadi, 2026).

<sup>19</sup> Ilham, 'Pendidikan Kesehatan Dan Sex Education' (Wawancara Pribadi, 2026).

didonorkan juga telah dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, meskipun dalam kondisi darurat tertentu dapat dilakukan pengecualian atas dasar pertimbangan medis yang mendesak.<sup>20</sup> Pelaksanaan program pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian HIV/AIDS dan IMS tidak dapat dijalankan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan keterlibatan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah, pemerintah daerah, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di setiap tingkatan wilayah, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Agamawan, swasta serta setiap individu dan keluarga di Provinsi Lampung. Namun KPA di Provinsi Lampung sudah tidak aktif, sehingga menjadikan suatu permasalahan dalam bentuk pencegahan sesuai program-program yang telah dibuat.

Peran Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan administratif semata, tetapi sebagai strategi yang dirancang secara sistematis dalam mengelola sumber daya, membangun koordinasi kelembagaan, serta menciptakan hubungan yang efektif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.<sup>21</sup>

Partisipasi masyarakat rt 13 lk I kelurahan sukabumi dalam program pencegahan HIV/AIDS juga menjadi indikator penting dari keberhasilan pendekatan berbasis komunitas. Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), kesediaan mengikuti tes dan konseling HIV secara sukarela, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan, serta dukungan terhadap ODHA di lingkungan sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai persepsi dan partisipasi masyarakat menjadi krusial untuk memahami sejauh mana program pencegahan HIV/AIDS telah diterima dan dijalankan secara efektif, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan pengetahuan yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS.

Tingkat partisipasi masyarakat rt 13 lk I kelurahan sukabumi dalam program pencegahan HIV/AIDS masih tergolong rendah. Sebagian besar informan mengaku jarang terlibat secara langsung dalam kegiatan penyuluhan atau program khusus terkait HIV. Informasi mengenai HIV lebih banyak diperoleh melalui media massa atau cerita dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa program pencegahan HIV belum sepenuhnya dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya di lingkungan tempat tinggal pada tingkat kelurahan dan desa.

Masyarakat menilai bahwa upaya pencegahan HIV yang dilakukan pemerintah masih belum maksimal karena masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan warga mengenai cara penularan dan pencegahan HIV. Masyarakat berharap adanya penyuluhan langsung yang lebih intensif dan berkelanjutan, serta pelibatan tokoh

<sup>20</sup> Yenni Hasrita, 'Program Program Dinas Kesehatan' (Wawancara Pribadi, 7 januari 2026).

<sup>21</sup> J Salusu, Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit (Grasindo, 2004).

masyarakat dan tenaga kesehatan setempat agar partisipasi dan kesadaran masyarakat dapat meningkat.<sup>22</sup>

Hambatan menjadi bagian penting dalam menganalisis efektivitas kebijakan publik di bidang kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Meskipun berbagai regulasi dan program telah dirumuskan secara komprehensif, pelaksanaannya di lapangan sering kali menghadapi beragam kendala yang bersifat struktural, institusional, maupun sosial. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor persepsi masyarakat, stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV/AIDS (ODHA), serta rendahnya partisipasi publik.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa hambatan utama dalam implementasi kebijakan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Lampung. Keterbatasan jangkauan program KIE yang belum menyentuh dunia usaha dan organisasi pada tingkat kelurahan secara optimal. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program pencegahan. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan serta pendekatan komunikasi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat menyebabkan program belum sepenuhnya dipahami. perubahan perilaku kesehatan memerlukan proses edukasi yang terus-menerus dan dukungan lingkungan sosial. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, kebijakan pemerintah berpotensi hanya berjalan secara administratif tanpa dampak signifikan terhadap penurunan angka kasus.<sup>23</sup> Lemahnya koordinasi lintas sektor yang tercermin dari belum optimalnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA). KPA yang seharusnya menjadi lembaga koordinatif lintas sektor dinilai kurang aktif, sehingga pelaksanaan program pencegahan HIV lebih banyak bertumpu pada Dinas Kesehatan. Stigma sosial terhadap penderita HIV masih menjadi tantangan yang signifikan. Stigma tersebut berpotensi menghambat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini, tes HIV, dan konseling, sehingga berdampak pada efektivitas program pencegahan HIV/AIDS. Stigma sosial menjadi salah satu faktor penghambat terbesar dalam upaya global penanggulangan HIV/AIDS. Dalam konteks lokal, stigma ini dapat memperlambat deteksi dini dan memperburuk penyebaran infeksi karena kurangnya keterbukaan dan kesadaran kolektif.<sup>24</sup>

## **1.2 Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013**

Dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan publik merupakan bagian integral dari kewenangan eksekutif (*al-sultah al-tanfidziyyah*) yang bertugas menjalankan peraturan perundang-undangan demi terwujudnya

<sup>22</sup> Dani, 'Program KIE' (Wawancara Pribadi, 8 Januari 2026).

<sup>23</sup> Soekidjo notoatmodjo, Ilmu Perilaku Kesehatan (Rineka Cipta, 2014).

<sup>24</sup> UNAID, 'Global AIDS Update Report', 2022, pp. 1-376.

kemaslahatan umum. *Fiqh siyasah* memandang bahwa pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pelaksana yang bertanggung jawab memastikan regulasi berjalan secara efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan untuk membangun pemerintahan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga, para ahli hukum telah mengatur kriteria untuk menjadi pemimpin. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58-59 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)”*.

Ayat diatas menggambarkan bahwa umat Islam berkewajiban menaati Allah SWT, Rasulullah, dan Ulil Amri sebagai pemegang otoritas dalam urusan masyarakat. Ulil Amri adalah pihak yang diberi kemampuan dan kewenangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik, sehingga kepemimpinan selalu terkait dengan kekuasaan yang harus digunakan untuk melayani dan menjaga kepentingan rakyat.<sup>25</sup> Karena itu, pemimpin menempati posisi sebagai pemegang amanah, yang dituntut untuk menjalankan tugasnya secara adil, bertanggung jawab, dan mampu membimbing sesuai prinsip-prinsip syariat. Amanah kekuasaan ini harus dijaga dan digunakan untuk kemaslahatan, sebagaimana diperintahkan dalam ayat diatas. Selain itu, tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan pencegahan HIV/AIDS juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُورٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*“Kalian semua adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang apa yang dipimpinnnya” (HR. Al Bukhori dan Muslim).*

<sup>25</sup> J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (RajaGrafindo Persada, 2002).

Hadis ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sebagai pemegang amanah kepemimpinan memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman, termasuk ancaman penyakit menular seperti HIV/AIDS. Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan implementasi Pasal 5 Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga berdimensi etis dan religius dalam perspektif *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah*.

Perspektif *Fiqh Siyasaḥ Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab kekuasaan eksekutif dalam mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan keadilan. Konsep ini berakar pada teori *Siyasaḥ Syar'iyah* yang dikembangkan oleh Ibn Taymiyyah, yang menegaskan bahwa tujuan utama pemerintahan dalam Islam adalah menegakkan keadilan, mewujudkan kemaslahatan umum, dan mencegah kerusakan (*mufṣadah*).<sup>26</sup> Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, implementasi Pasal 5 Perda tersebut berorientasi pada perlindungan terhadap tujuan-tujuan utama syariat, terutama *ḥifz al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifz al-naṣl* (perlindungan keturunan). HIV/AIDS merupakan penyakit yang tidak hanya mengancam keselamatan jiwa individu, tetapi juga berdampak pada keberlangsungan keluarga, stabilitas sosial, dan kualitas generasi mendatang. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS merupakan kewajiban kolektif (*farḍ kifāyah*) yang harus diemban oleh negara melalui kebijakan publik yang terstruktur dan berkelanjutan.

Perspektif *Siyasaḥ Tanfidziyah*, implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 telah menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat melalui pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, seperti penyuluhan dan edukasi kesehatan, pelayanan pemeriksaan dan pengobatan, penyediaan layanan konseling, serta koordinasi lintas sektor dalam pengendalian penyebaran HIV/AIDS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Provinsi Lampung dalam kondisi tidak aktif. Kondisi ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan menunjukkan adanya kegagalan institusional (*institutional failure*) dalam struktur pelaksana kebijakan. Dalam perspektif *Siyasaḥ Tanfidziyah*, keberadaan lembaga seperti KPA merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi eksekutif secara kolektif dan terkoordinasi. Ketidakaktifan KPA menyebabkan terjadinya kekosongan fungsi koordinasi lintas sektor, sehingga pelaksanaan program pencegahan HIV/AIDS menjadi tidak terintegrasi dan cenderung bertumpu hanya pada Dinas Kesehatan. Dengan demikian, permasalahan utama dalam implementasi Pasal 5 tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaan, tetapi pada melemahnya struktur kelembagaan yang seharusnya menjadi penggerak utama kebijakan.

Dalam konteks ini, implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah tidak dapat dipandang sebagai tugas administratif semata, melainkan sebagai bagian dari amanah ulil amri yang memiliki dimensi religius. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan

<sup>26</sup> M Iqbal, 'Fiqh Siyasaḥ Kontekstual Doktrin Politik Islam', Prenada Media, Jakarta, 2014.

berkewajiban menjaga keselamatan jiwa masyarakat (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, setiap kelalaian dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan, termasuk pencegahan HIV/AIDS, tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga dapat dipandang sebagai bentuk belum optimalnya pelaksanaan amanah *syar'i* dalam melindungi kehidupan manusia.

Ketidakaktifan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Provinsi Lampung menunjukkan adanya kegagalan institusional dalam menjalankan fungsi *al-sultāh al-tanfīdīyah*. Dalam *perspektif Siyāsah Tanfīdīyah*, pemerintah tidak hanya dituntut untuk memiliki kebijakan yang baik, tetapi juga memastikan bahwa perangkat kelembagaan yang dibentuk mampu menjalankan fungsinya secara efektif. Kegagalan lembaga dalam berfungsi secara optimal berimplikasi pada terhambatnya pencapaian kemaslahatan dan menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pemerintahan (*governance*). Permasalahan utama bukan hanya pada kurangnya program, tetapi pada tidak berjalannya sistem kelembagaan yang seharusnya menjadi penggerak implementasi kebijakan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* khususnya *siyāsah tanfīdīyah*, implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 pada dasarnya telah mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), namun belum optimal karena adanya kegagalan institusional yang ditandai dengan tidak aktifnya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), sehingga fungsi eksekutif dalam pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara efektif, terintegrasi, dan belum sepenuhnya memenuhi amanah ulil amri dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

## D. PENUTUP

### 1.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013, dapat ditarik beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Kesehatan secara normatif telah menjalankan mandat Pasal 5 melalui berbagai program teknis, termasuk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), layanan tes dan konseling HIV di fasilitas kesehatan, serta surveilans epidemiologi. Namun, efektivitasnya di lapangan masih terhambat oleh keterbatasan jangkauan edukasi yang belum menyentuh sektor dunia usaha secara merata dan rendahnya partisipasi aktif masyarakat akibat stigma sosial yang masih kuat.
2. Secara substantif, kebijakan penanggulangan HIV/AIDS ini selaras dengan prinsip *Siyāsah Syar'īyah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan perlindungan terhadap *Maqāshid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*). Implementasi ini dipandang sebagai perwujudan

amanah *Ulil Amri* dalam menjaga keselamatan publik dari ancaman penyakit menular.

3. Kendala utama yang ditemukan adalah tidak aktifnya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Lampung sebagai lembaga koordinatif lintas sektor. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya fungsi eksekutif dalam menjalankan mekanisme pemerintahan yang terintegrasi, sehingga tanggung jawab pencegahan seolah-olah hanya bertumpu pada satu instansi kesehatan.

## 1.2 Saran

1. Pemerintah Provinsi Lampung perlu segera mengaktifkan kembali peran KPA untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral agar kebijakan tidak berjalan secara administratif semata.
2. Edukasi Berbasis Komunitas, mmpertluas jangkauan program KIE dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai agen perubahan untuk mengikis stigma negatif terhadap ODHA di tingkat akar rumput.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi komparatif antar wilayah atau mendalami aspek efektivitas anggaran dalam mendukung keberlanjutan program pencegahan HIV/AIDS

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S, 'Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Pp. 22--23)', PT. Rineka Cipta, 2013
- Badan Pusat Statistika Provinsi Lampung, 'Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Penyakit Di Provinsi Lampung, 2024 - Tabel Statistik', 2024 <<https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/3/YTA1Q1ptRmhUMEpXWTBsQmQyZzBjVzgwUzB4aVp6MDkjMw==/kasus-penyakit-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-penyakit-di-provinsi-lampung--2024.html?year=2024>> [accessed 19 September 2025]
- Dani, 'Program KIE' (Wawancara Pribadi, 2026)
- Hasrita, Yenni, 'Program Program Dinas Kesehatan' (Wawancara Pribadi, 2026)
- I Denny, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan Hiv/Aids Di Kabupaten Lamongan', *Jurnal Kelitbangan Kabupaten Lamongan*, 7 (2024)
- Ilham, 'Pendidikan Kesehatan Dan *Sex Education*' (Wawancara Pribadi, 2026)
- Iqbal, M, 'Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam', Prenada Media, Jakarta, 2014
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, 2006
- Kiana, Otta Nur, 'Program KIE' (Wawancara Pribadi, 2026)
- Kirana, Otta Nur, 'Pandangan Terhadap HIV' (Wawancara Pribadi, 2026)
- — —, 'Pendidikan Kesehatan Dan Sex Education' (Wawancara Pribadi, 2026)
- Kusmayadi, Nur Wandira, and Diana Hertati, 'Implementasi Kebijakan Penanggulangan HIV/AIDS', *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.2 (2022), pp. 122-29 <<https://jkp.ejournal.unri.ac.idhttps://jkp.ejournal.unri.ac.id>>

- MUBAROKAH, OKAH, Akhmad Khalimy, Yosep Muhammad Firdau, and Henrizal Hadi, 'Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Penyebaran HIV/AIDS Di Kabupaten Cirebon', *JATISWARA*, 40.1 (2025), doi:10.29303/jtsw.v40i1.1175
- notoatmodjo, Soekidjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Rineka Cipta, 2014)
- Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan, Penanggulangan Dan Pengendalian Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Dan Infeksi Menular Seksual (IMS) Di Provinsi Lampung
- Pratama, Ananda Horizki, Hary Priyanto, and Niko Pahlevi Hentika, 'Analisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Hiv/Aids Pada Gay Di Kabupaten Banyuwangi', *Katarsis*, 1.3 (2024), doi:10.62734/kts.v1i3.279
- Putri, Firrie Ninditha, Asep Sumaryana, and Dedi Sukarno, 'Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Bogor', *Jurnal Administrasi Negara*, 14.1 (2022), pp. 16-31
- Rosadi, Aden, and Nashrulloh Nashrulloh, 'Kritik Hukum Islam Atas Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Dalam Peraturan Daerah', *Al-'Adalah*, 14.1 (2018), p. 47, doi:10.24042/adalah.v14i1.2135
- S, Kartika, Deni Yolanda, and Helma Maraliza, 'Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1.2 (2021), pp. 60-73, doi:10.24042/as-siyasi.v1i2.11006
- Salusu, J, *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik Dan Organisasi Nonprofit* (Grasindo, 2004)
- Satria, 'Program KIE' (Wawancara Pribadi, 2026)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2018)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Rineka Cipta, 2006)
- Suyono, *Kesehatan Masyarakat Indonesia* (Rineka Cipta, 2010)
- Suyuthi Pulungan, J, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (RajaGrafindo Persada, 2002)
- UNAID, 'Global AIDS Update Report', 2022, pp. 1-376